

IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TAMPERAN KABUPATEN PACITAN (STUDI PERMEN KP NOMOR 1/PERMEN-KP/2017)

Djamaludin Malik ^{1*}, Mudiyanto¹, Maxima Ari Saktiono ²

¹ Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, Fakultas Vokasi Pelayaran, Universitas Hang Tuah

² Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal, Fakultas Vokasi Pelayaran, Universitas Hang Tuah

*Email: djamaludinmalik61@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara hasil penelitian adalah komunikasi dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai satuan tugas pengawas SDKP telah memadai. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor. Tujuannya agar dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan penerbitan SLO kapal penangkap ikan.

Kata Kunci: surat laik operasi, kapal ikan

Abstract

This study aims to determine the implementation of the issuance of a Letter of Operational Eligibility (SLO) for Fishing Vessels at the Tamperan Coastal Fishing Port, Pacitan Regency. The research method uses qualitative research methods. Based on the results of observations and interviews, the results of the research are that communication can determine the success of achieving the objectives of the implementation of public policies, the availability of the number of human resources as an SDKP supervisory task force is adequate. Commitment is evidenced by looking at the reasons for the implementor. The goal is to be able to carry out the implementation, the goals /changes to be achieved, and the changes that have been achieved by the implementers for the implementation of the policy of issuing SLO fishing vessels.

Keywords: letter of operation, fishing vessel

PENDAHULUAN

Kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan pekerjaan yang paling membahayakan di dunia. Terdapat 36 juta orang yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan, 15 juta diantaranya terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan dan budidaya perikanan, 15 juta diantaranya terlibat dalam penangkapan ikan di laut, 90% nelayan bekerja pada kapal-kapal berukuran panjang kurang dari 24 m FAO (2000). Profesi pelaut kapal penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan bersifat “3d” yaitu: membahayakan (*dangerous*), kotor (*dirty*) dan sulit (*difficult*). ILO diperkirakan terdata

24.000 kecelakaan fatal pertahun di seluruh dunia.

Perairan Pacitan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia memiliki dasar perairan yang berkarang dengan ombak yang besar. Namun perairan ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan melimpah. Perlu adanya pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada dengan bertanggung jawab. Kondisi Pacitan yang merupakan daerah pesisir disebagian wilayahnya, membuat potensi perikanan menjadi satu potensi yang memiliki masa depan yang cerah. Dengan luas wilayah laut Kabupaten Pacitan mencapai 7.636 Mil persegi dengan

12 pantai, hal itu merupakan daerah strategis untuk pendaratan ikan oleh nelayan.

KNKT menginvestigasi didapatkan kesimpulan yaitu faktor penyebab kecelakaan diatas kapal yang berkontribusi, diantaranya kelalaian manusia (*human error*), teknis dan cuaca (Sereati Hasugian; 2017). Untuk itu diperlukan adanya Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan yang akan beroperasi untuk mengurangi atau setidaknya meminimalkan kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh faktor teknis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Implementasi Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan (Studi Permen KP NOMOR 1/PERMEN-KP/2017) agar peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan.

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008) menjelaskan bahwa: Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan keputusan kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan publik dalam sistem politik oleh badan pemerintahan. Badan Pemerintahan tersebut melaksanakan pekerjaan kebijakan hari demi hari, sehingga menuju kinerja kebijakan. Banyak aktor kebijakan yang terlibat dalam implementai tersebut sehingga suatu kebijakan seakan-akan menjadi rumit. Dalam mengkaji suatu pelaksanaan yang menyangkut kebijakan laik operasi, utamanya adalah masalah pesyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan. Adapun beberapa

teori implementation yang menjadi landasan teori, yaitu :

George C. Edwards III, 1980, mengemukakan; “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What the are the prediction for succesful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

Komunikasi

Pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan merupakan hal yang penting. Disini terjadi transfer pengetahuan mengenai kebijakan meliputi hakikat kebijakan, cara pelaksanaan, batasan-batasan norma, evaluasi terhadap kebijakan dan lain sebagainya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi adalah *transmission* yaitu cara penyampaian informasi; *clarity* yaitu kejelasan informasi; serta *consistency* yaitu konsistensi dalam penyampaian.

Sumber daya

Sumber daya yang tidak memadai berakibat tidak dilaksanakannya program secara sempurna komponen sumber daya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan program. Sumber daya dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia.

Disposisi

Disposisi diterjemahkan sebagai pembawaan/ kepribadian/ pandangan/ ideologi pelaksana kebijakan publik.

Dengan asumsi bahwa semua pegawai pemerintah (pelaksana kebijakan publik) sudah lolos seleksi kepribadian pada saat penerimaan pegawai, maka disposisi lebih dimaksudkan sebagai ketepatan atau kecocokan tipe/ kepribadian antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan.

Struktur Birokrasi

Aspek keempat yang menurut Edward III mempengaruhi implementasi kebijakan publik adalah *bureaucratic structure* atau struktur birokrasi. Birokrasi yang dimaksud disini adalah keseluruhan jajaran pemerintah, meliputi semua pejabat negara dan pegawai berstatus pegawai negeri maupun non pegawai negeri (pegawai tidak tetap, mitra kerja, dan lain sebagainya); serta struktur pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat

Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. (Permen KP NOMOR 1/PERMEN-KP/2017). Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan SLO antara lain Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui studi kasus penelitian ini dilakukan secara intensif dan mendalam sehingga menjawab mengapa keadaan itu terjadi dan peneliti diharapkan dapat menemukan hubungan yang tadinya tidak diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh.

Pada penelitian ini lokasi yang diteliti adalah di Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan Kabupaten Pacitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan adalah salah satu pelabuhan Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Jawa Timur. Pelabuhan Tamperan terletak di Kabupaten Pacitan tepatnya pada posisi koordinat lintang 8° 13'30, 85" LS dan bujur 111° 4' 28, 49" BT, berada di sisi kiri Teluk Pacitan.

Tabel 1. Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kecamatan dan Jenis Kapal di Kabupaten Pacitan 2020

Kecamatan /Subdistrict	Perahu Tanpa Motor/Nonpowered Boat	Perahu Motor Tempel/Outboard Motorboat	Kapal Motor/Inboard Motorboat
1	2	3	4
1 Donorojo	-	70	-
2 Punung	-	-	-
3 Pringkuku	29	210	-
4 Pacitan	-	276	143
5 Kebonagung	-	449	-
6 Arjosari	-	-	-
7 Nawangan	-	-	-
8 Bandar	-	-	-
9 Tegalombo	-	-	-
10 Tulakan	-	20	-
11 Ngadirojo	-	419	-
12 Sudimoro	-	65	-
Pacitan	29	1 559	143

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan

Source: Marine and Fishery Services

Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dikomunikasikan kepada organisasi atau publik serta sikap tanggapan dari pihak yang terlibat. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi adalah elemen penting yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat ditinjau dari komunikasi yang ada. Kebijakan dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan dapat tepat tersampaikan. Sehingga diperlukannya tiga hal, yaitu penyaluran (transmisi) dengan baik yang dapat menghasilkan implementasi yang baik pula, dengan adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membuat bingung dalam pelaksanaannya. Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi. Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penerbitan SLO kapal penangkap ikan di Pacitan. Faktor kedua adalah faktor kejelasan. Indikator dari faktor kejelasan komunikasi adalah merupakan elemen yang sangat penting. Kejelasan komunikasi dapat menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan publik. Kejelasan komunikasi dalam implementasi dalam perbitan SLO, terdiri dari penyampaian informasi oleh dinas SDKP dan masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menganalisis bahwa transmisi komunikasi, dan kejelasan komunikasi oleh Dinas SDKP dengan masyarakat nelayan tentang penerbitan surat laik operasi (slo) kapal perikanan berjalan sangat baik.

Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi tentang sumber daya manusia, sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Peneliti menganalisis secara kuantitas, ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai satuan tugas pengawas SDKP telah memadai. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa setiap bagian

pengawas SDKP memiliki koordinator dan kelompok. Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumber daya anggaran. Sehingga sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor yang cukup penting demi berjalannya kebijakan ini dengan baik. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal dapat menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi dapat menentukan sebuah keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor agar dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan penerbitan SLO kapal penangkap ikan. Berdasarkan hasil wawancara dinas SDKP dapat diketahui bahwa komitmen para implementor dinas SDKP sudah baik namun hal tersebut belum terciptanya sistem sosialisasi yang baik dengan masyarakat nelayan tentang pentingnya penerbitan SLO.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan penerbitan SLO kapal penangkap ikan. Salah satu karakteristik utama dari birokrasi menurut Edward, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP). Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan bahwa dinas SDKP telah mengikuti SOP dengan

benar dalam implementasi penerbitan SLO, seperti pada gambar 1.



Gambar 1. SOP Penerbitan SLO

Sumber: gatrik.esdm.go.id

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi penerbitan surat laik operasi (SLO kapal perikanan di pelabuhan perikanan pantai Tamperan Kabupaten Pacitan telah berjalan optimal. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dikomunikasikan kepada organisasi atau publik serta sikap tanggapan dari pihak yang erlibat. Transmisi komunikasi, dan kejelasan komunikasi oleh Dinas SDKP dengan masyarakat nelayan tentang penerbitan surat laik operasi (slo) kapal perikanan berjalan sangat baik.
- Sumber daya manusia yang berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Peneliti menganalisis secara kuantitas, ketersediaan jumlah sumber daya manusia sebagai satuan tugas pengawas SDKP telah memadai.
- Disposisi dapat menentukan sebuah keberhasilan implementasi kebijakan. komitmen para implementor dinas

SDKP sudah baik namun hal tersebut belum terciptanya system sosialisasi yang baik dengan masyarakat nelayan tentang pentingnya penerbitan SLO.

- Dinas SDKP telah mengikuti SOP dengan benar dalam implementasi penerbitan SLO.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ahmad, J, 2011, *Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan (Vol. I)*. Makassar: Badan Penerbit UNM
- FAO, 2000, *Global Forest Products Outlook Study: Thematic Study on Plantations* by Brown, C. Working Paper No. GFPOS/WP/03. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Hasugian, Sereati. Wahyuni, A.A. Sri, Istri. Rahmawati, Maulidiah. Arleiny, 2017, "Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT Mapping of Vessel Accident Characteristics in Indonesia Based on Investigation of KNKT".Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2.hal 229-240

- Indrawan, Rully; Yaniawati, R. Poppy, 2014, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Aditama
- Jamaludin, 2016, Implementasi Kebijakan Laik operasi Kapal Perikanan oleh UPT Pos Pengawasan Sumber daya kelautan dan perikanan (Studi permen KP No.45 tahun 2014 di perbatasan indonesia malaysia”. Thesis. Jakarta: Universitas Terbuka
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat laik Operasi Kapal Perikanan
- Soewito dkk, 2000, *Sejarah Perikanan Indonesia*. Jakarta: Yasmina
- Suwardjo, Djodjo. Haluan, John. Jaya, Indra. Poernomo Soen'an H, 2010, “Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan kpal kapal Penangkap ikan yang berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap”. *Maritek*. Vol 10. No 1: 61-72
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.